

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP DEBITUR YANG WANPRESTASI DALAM PENGAMBILAN KREDIT DI LEMBAGA PERBANKAN

Soetrisno

Fakultas Hukum UPN"Veteran" Jatim

Abstrak

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian dan tindakan hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian kredit perbankan.

Penyaluran dana kepada masyarakat yang berupa kredit ini tidak selamanya dikembalikan oleh peminjam tepat waktu atau sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Ada yang tidak tepat waktunya, ada yang mengulur-ulur dan bahkan ada yang memang tidak mampu lagi mengembalikan pinjaman tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis praktis dan gabungan metode deduksi dan metode induksi. Secara yuridis pembahasan penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Sedang secara sosiologis pembahasan penelitian ini didasarkan pada kejadian yang ada dalam prakteknya.

Pemberian kredit dari bank harus ditunjang dengan peningkatan aktifitas usaha debitur dengan cara yang lebih efisien. Sebab peningkatan aktifitas yang tidak diikuti dengan peningkatan efisiensi akan dapat berakibat buruk bagi kemampuan-kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajiban untuk melunasi kredit.

Larangan pemberian kredit oleh bank tanpa jaminan sebenarnya bertujuan untuk menjamin supaya kredit dikembalikan oleh debitur sehingga bank tidak rugi tetapi hal ini menghambat usaha-usaha yang dapat menunjang pembangunan nasional yang biasanya diusahakan oleh pengusaha kecil.

Penyelesaian melalui jalur hukum yang ada merupakan langkah pengamanan baik untuk debitur dan pihak bank. Bagi debitur tidak akan terkena perbuatan semena-mena dari kreditur. Sedang bagi bank/kreditur, seandainya debitur tidak mau membayar hutangnya maka bank dapat melakukan penyitaan barang jaminan.

Kata kunci: debitur, wanprestasi, perjanjian kredit.

PENDAHULUAN

Sektor perbankan telah menunjukkan peranannya yang semakin penting dalam menunjang pembangunan ekonomi nasional baik melalui fungsinya sebagai penghimpunan dana maupun sebagai lembaga yang dapat menyalurkan kembali dana tersebut kepada berbagai pihak dan kegiatan yang potensial.

Kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang berarti kepercayaan. Sedang dari sudut ekonomi kredit artinya penundaan pembayaran suatu barang tidak dilakukan bersamaan pada saat menerimanya tetapi

dilakukan pada waktu yang akan datang. (Edy Putra T, 1981)

Pengertian kredit dapat kita lihat pada Pasal 1 ayat 11 Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dimana dinyatakan bahwa : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga;.

Hukum Perjanjian menganut sistem terbuka, artinya hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan.(Subekti, 1987)

Syarat-syarat untuk pemberian kredit oleh tiap bank berbeda-beda tergantung dari kepentingan dan kesepakatan dari bank pemberi dengan pemohon kredit.

Kredit itu diberikan atas dasar suatu kepercayaan namun factor jaminan kredit merupakan hal yang dominant di dalam hal memperoleh kredit. Kredit yang diberikan oleh bank perlu diamankan. Tanpa adanya pengamanan, bank sulit mengelakkan resiko yang datang, sebagai wanprestasi debitur. Untuk mendapatkan kepastian dan keamanan dari kreditnya, bank melakukan tindakan pengamanan dan meminta kepada debitur agar mengikatkan suatu barang tertentu sebagai jaminan dalam kreditnya.

Penyaluran dana kepada masyarakat yang berupa kredit ini tidak selamanya dikembalikan oleh peminjam tepat waktu atau sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Ada yang tidak tepat waktunya, ada yang mengulur-ulur dan bahkan ada yang memang tidak mampu lagi mengembalikan pinjaman tersebut.

Kredit macet yaitu kredit yang menunggak lebih dari 3 bulan setelah saat jatuh tempo kredit diragukan yang telah melebihi batas waktu 18 bulan dan dinyatakan macet. BRI, Pedoman Umum Operasi Perkreditan BRI, Jakarta ,1981, Hal.30)

Dalam menghadapi debitur yang wanprestasi maka pada bank terdapat beberapa cara penyelesaian dimana tiap-tiap cara akan membawa akibat hukum yang berbeda.

Dari uraian yang saya kemukakan diatas, maka saya akan memaparkan dan membahas masalah-masalah berikut :

- a. Tindakan apa yang diambil oleh bank dalam menghadapi debitur yang wanprestasi?
- b. Bagaimanakah penyelesaian hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian kredit?

METODE PENELITIAN

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penyelesaian dan tindakan hukum terhadap debitur yang melakukan wanprestasi pada perjanjian kredit.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis praktis dan gabungan metode deduksi dan metode induksi. Secara yuridis pembahasan penelitian ini berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW). Sedang secara sosiologis pembahasan penelitian ini didasarkan pada kejadian yang ada dalam prakteknya.

Metode deduksi bertolak dari pembahasan peraturan perundang-undang yang diterapkan dalam kejadian-kejadian perjanjian kredit. Metode induksi bertolak dari masalah perjanjian kredit yang digunakan untuk menganalisis akibat-akibat yang dialami para kreditur bank dalam kaitannya dengan wanprestasinya debitur.

Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan dokumen berkaitan dengan masalah perkreditan, wawancara secara langsung dengan orang yang terlibat dalam proses perjanjian kredit di Lembaga Perbankan, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut permasalahan perkreditan..

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis secara diskriptif artinya menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada dalam perjanjian kredit yang terjadi dalam praktek dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Tindakan yang diambil dalam menghadapi Debitur yang wanprestasi

Dalam membahas wanprestasi kita tidak bisa lepas dari perjanjian karena tanpa adanya perjanjian maka wanprestasi tidak akan pernah ada. Perjanjian diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut BW) dalam bab tentang perikatan yaitu bahwa suatu perjanjian itu sah jika telah memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam Pasal 1320 BW yaitu sepakat mereka yang mengikatkan diri, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.

BW tidak mengatur tentang perjanjian kredit bank bahkan Undang-undang Perbankan tidak mengenal istilah perjanjian kredit bank. Istilah perjanjian kredit bank ditemukan dalam instruksi Presidium Kabinet No 15/EKE/10/1960 yo Surat Edaran Bank Negara Indonesia Unit 1 No. 2/539/UPK/Pemb/1966 dan Surat Edaran Bank Negara Indonesia No.2/643/UPK/Pemb/1966 tentang Pedoman Kebijaksanaan di Bidang Perkreditan.

Dalam instruksi tersebut dinyatakan bahwa dalam memberikan kredit bentuk apapun, bank wajib mempergunakan “akad Perjanjian kredit”.

Dengan penentuan terlebih dahulu itu membuat calon debitur dapat berbuat lain selain menyetujui dan menandatangani perjanjian karena ia sangat membutuhkan kredit tersebut. Perjanjian kredit seperti itu adalah perjanjian sepihak. Penentuan perjanjian secara sepihak yaitu oleh bank adalah untuk menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena biasanya debiturlah yang nakal, bank tidak menanggung segala resiko jika kreditnya macet.

Pada saat ini salah satu pihak dapat melakukan pembatalan, baik pihak bank atau calon debitur. Seandainya pihak bank mengetahui bahwa calon debitur tidak dapat dipercaya dan mempunyai reputasi yang

jelek maka bank dapat membatalkan dan mempunyai reputasi yang jelek maka bank dapat membatalkan perjanjian tersebut, demikian juga pada calon debitur seandainya pada saat itu ia sudah tidak membutuhkan kredit lagi maka ia dapat menuntut pihak yang membatalkan perjanjian kredit pada saat ini karena hal ini sesuai dengan Undang-undang Perbankan.

2. Wanprestasi Ditinjau dari Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang berarti prestasi buruk. Prestasi mengandung arti bahwa suatu hal yang harus dilaksanakan dalam suatu perjanjian yang telah disepakati oleh kedua pihak. Maka jika pengertian wanprestasi dihubungkan dengan perjanjian kredit adalah suatu keadaan dimana seorang debitur yang dimaksud adalah dan kreditur. Kewajiban debitur yang dimaksud adalah debitur harus membayar kembali kredit yang telah dipinjamnya setelah jangka waktu tertentu.

Wanprestasi diatur dalam buku III BW dan tersirat dalam pasal-pasal Bab I Buku III BW tersebut. BW tidak memberikan suatu definisi dan ketentuan yang tegas dan jelas mengenai wanprestasi, tapi kita dapat membaca dan menyimpulkan pengertian wanprestasi pasal 1238 BW.

Berdasar pasal 1238 BW si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Penetapan lalai ini merupakan surat teguran dari kreditur kepada debitur dengan tujuan memberitahukan kapan selambat-lambatnya debitur harus memenuhi prestasinya. Manakala sudah dilakukan somasi/ teguran berkali-kali debitur tetap tidak mau memenuhi prestasi yang telah disepakati bersama, maka ia harus menanggung segala akibat yang merugikan yang disebabkan oleh tidak dipenuhinya prestasi.

Pemberian jangka waktu itu penting sebab jika tidak ditentukan batas sampai tanggal berapa debitur paling lambat harus

telah memenuhi prestasi maka debitur akan beranggapan bahwa kreditur akan menerima prestasi yang ditentukan setiap waktu dan waktu tersebut dapat diulur-ulur sampai kapan saja tanpa adanya wanprestasi. Adanya tenggang waktu tersebut bertujuan untuk mencegah debitur yang beritikad tidak baik yang hendak menunda-nunda pemenuhan prestasi tersebut. Mengenai tenggang waktu itu tidak ada ketentuannya dalam Undang-undang. Para sarjana memandang bahwa pemberian tenggang waktu itu harus sesuai dengan kepantasan, jika pemenuhan prestasi memerlukan waktu yang lama maka tenggang waktu yang diberikan juga sedikit.

Dalam praktek ukuran untuk menentukan bahwa suatu piutang atau kredit itu dinyatakan macet pada tiap-tiap bank tidaklah sama. Pada umumnya Bank menyebutkan penggolongan kredit macet sebagai berikut :

a. Kredit ragu-ragu

Kredit ragu-ragu adalah pinjaman yang setelah tiga bulan jatuh tempo tidak dibayar lunas oleh nasabah. Dinamakan ragu-ragu sebab ada dua kemungkinan, pertama nasabah melunasi kreditnya pada bulan berikutnya, kedua nasabah tidak dapat melunasi pinjaman kreditnya sehingga pihak bank perlu mengambil langkah-langkah penyelamatan atas kredit yang telah diberikan.

b. Kredit tidak lancar

Jika kredit ragu-ragu yang telah enam bulan tidak diselesaikan oleh nasabah sehingga bank mengambil langkah penyelamatan, karena kredit kurang lancar ini mengarah pada kredit macet.

c. Kredit macet

Setelah kredit kurang lancar lebih dari enam bulan (selambat-lambatnya delapan belas bulan) nasabah masih tidak melunasi kreditnya maka bank akan menyerahkan pada panitia Urusan Piutang Negara (yang selanjutnya disebut PUPN) atau Pengadilan Negeri agar penyelesaian kredit itu dilakukan menurut peraturan perundang-undangan

atau ketentuan lain dari Panitia Urusan Piutang Negara.

Tetapi pada dasarnya lembaga perbankan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2/PMK.01/1977/ tentang pelaksanaan penyelesaian piutang Negara yang macet. Dalam pasal 3 peraturan tersebut ditegaskan mengenai kapan saatnya suatu piutang dinyatakan macet yaitu :

- 1). Untuk kredit jangka pendek, selambat-lambatnya tiga bulan setelah jatuh tempo
- 2). Untuk jangka menengah dan panjang, meskipun pinjaman itu belum melampaui jangka panjang waktu, akan tetapi terdapat tunggakan pembayaran sebanyak-banyaknya tiga kali angsuran pokok dan berdasarkan penilaian yang wajar dari pihak bank, debitur tidak akan dapat melunasi hutang pokok dan bunganya, maka kredit tersebut dapat digolongkan sebagai kredit macet.

Akibat wanprestasi yang dilakukan debitur akan sangat merugikan debitur sendiri karena sejak terjadinya wanprestasi tersebut debitur berkewajiban untuk mengganti kerugian yang dialami oleh kreditur. Sanksi yang akan diberikan oleh kreditur dapat meminta ganti kerugian sebagai akibat tidak dilaksanakannya kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur sesuai dengan perjanjian, diadakan peralihan resiko, meminta pembatalan perjanjian dan ganti rugi.

Penggantian ganti rugi diatur dalam pasal 1236, 1239, 1243 dan 1244 BW. Pada dasarnya semua pasal ini mewajibkan debitur memberikan ganti rugi jika debitur tidak memenuhi perjanjian yang telah disepakatinya baik kewajiban untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu. Ganti rugi yang diminta bisa berupa biaya, rugi dan bunga.

Besar atau luasnya ganti rugi diatur dalam pasal 1247, 1248, 1249 dan 1250 BW. Pasal-pasal tersebut memuat tuntutan ganti rugi sebagai berikut :

- a. Kerugian itu harus dapat diduga atau ditentukan jumlahnya pada waktu perjanjian dibuat (pasal 1247 BW);

- b. Kerugian yang disebabkan karena debitur beritikad tidak baik adalah merupakan akibat langsung dari tidak dipenuhinya perjanjian yang telah disepakati (pasal 1248 BW);
- c. Ganti rugi tidak boleh melebihi atau kurang dari jumlah yang telah diperjanjikan (Pasal 1249);
- d. Sedangkan ganti rugi yang berupa bunga tidak boleh melebihi dari apa yang telah ditentukan Undang-undang tanpa mengurangi peraturan khusus (pasal 1250 BW).(Subekti, 1985)

3. Syarat-syarat Wanprestasi Bagi Debitur Bank

Seorang debitur akan melakukan wanprestasi jika tidak ada sebab-sebabnya, untuk mengetahui sebab-sebab tersebut diperlukan suatu pengamatan yang mendalam. Penyebab dari kemacetan kredit bank terutama karena kesulitan keuangan yang dialami debitur. (Edy Putra Tjeman, 1989, hal.49)

Kesulitan keuangan ini menyebabkan debitur tidak dapat mengembalikan pinjamannya tepat pada waktunya. Kesulitan keuangan yang dialami itu bisa disebabkan karena factor intern dan factor ekstern.

Factor intern adalah masalah yang ada di dalam perusahaan itu sendiri yaitu karena ketidak kemampuan debitur dalam mengelola perusahaannya dengan baik. Keberhasilan usaha tergantung pada kemampuan dari pengurus dalam mengelola perusahaannya. Kemampuan itu antara lain meliputi kemampuan dalam bidang adminitrasi serta bidang lain meliputi kemampuan dalam bidang manajemen, bidang keuangan, bidang pemasaran, bidang adminitrasi serta bidang lain yang berhubungan langsung dengan aktifitas usaha yang dilakukan debitur. Karena debitur mempunyai kemampuan itu maka usaha perusahaannya akan meningkat dan pendapatannya akan cukup untuk mengembalikan kreditnya. (Muchdarsyah Sinungan, 1978, Hal.12.)

Ketidakmapuan debitur dalam menjalankan usahanya tidak sama dengan ketidakjujuran debitur. Karena debitur tidak mampu menjalankan usahanya ia ingin memnuhi kewajiban, yaitu dengan melakukan mengelola suatu usaha. Sedang ketidakjujuran adalah sikap mental dari debitur yang yang memang berniat untuk “nakal” dan mempunyai itikad tidak baik terhadap kredit yang diperolehnya.

Pemberian kredit dari bank harus ditunjang dengan peningkatan aktifitas usaha debitur dengan cara yang lebih efisien. Sebab peningkatan aktifitas yang tidak diikuti dengan peningkatan efisiensi akan dapat berakibat buruk bagi kempuan-kemampuan debitur dalam melaksanakan kewajiban untuk melunasi kredit.

Sebenarnya kesulitan keuangan tidak saja terletak pada ketidakmampuan manajemen dari debitur. Ada juga pengaruh yang tidak kalah pentingnya yang dapat menyebabkan kesulitan keuangan debitur yang lazim disebut dengan factor ekstern. Factor ekstern ini adalah penyebab kesulitan keuangan yang terjadi karena sebab-sebab diluar jangkauan kemampuan manajemen, seperti misalnya : a).perubahan dari kondisi perekonomian dan perdagangan; b).perubahan peraturan atau kebijaksanaan pemerintah; c). perubahan teknologi; d). bencana alam; e)hama penyakit.

Perubahan peraturan atau kebijaksanaan pemerintah dalam bidang perekonomian dapat mengakibatkan terpengaruhnya jalannya usaha debitur baik secara langsung atau tidak langsung.

Daya beli masyarakat yang menurun bisa mengakibatkan berkurangnya pemasukan pengusaha dan mengganggu kelancaran perekonomian. Berkurangnya daya beli bisa dikarenakan adanya inflasi, perang, bencana alam dan sebagainya.

Akibat kemajuan teknologi juga bisa merugikan suatu perusahaan karena bagi perusahaan yang besar dan modalnya kuat tidak akan ada masalah untuk memperbarui mesin-mesin produksinya dengan yang

paling mutakhir, sehingga produksi menjadi lebih lancar, efektif dan produksi bisa lebih banyak, keuntungan bisa diperoleh lebih banyak. Sedang bagi perusahaan yang kecil untuk mengganti mesin baru tidak mempunyai modal cukup maka hasil produksinya kalah banyak sehingga keuntungannya semakin berkurang, dan kalah bersaing dengan perusahaan yang berteknologi canggih.

Pengamanan yang dilakukan pada bank bisa terdiri dari dua cara yaitu dengan penyelesaian administrasi dan tindakan langsung pada diri debitur. penyelesaian administrasi yang bisa dilakukan bank adalah penertiban administrasi dengan maksud untuk mengetahui berapa kerugian yang diderita oleh bank, untuk mengetahui apakah ada orang dalam/intern bank ataupun pihak lain dari bank yang terlibat. Untuk menyelamatkan kembali posisi bank dari kerugian yang lebih besar dan berusaha menyusun administrasi yang telah diselewangkan tersebut.

Jika seandainya semua cara itu tetap tidak bisa menyelamatkan debitur dari kemacetan membayar hutang pokok dan bunga kredit maka bank akan melakukan upaya maksimal untuk pengembalian kreditnya sehingga bank tidak dirugikan yaitu dengan menyerahkan masalah tersebut pada pihak yang berwenang. Yang berarti menempuh penyelesaian lewat hukum yang ada, baik melalui Pengadilan Negeri atau PUPN.

4. Pertanggungan ganti rugi oleh Pihak Ketiga.

Pada dasarnya pemberian kredit pada pemohon kredit adalah untuk membantu pemohon kredit untuk menjalankan usahanya. Bank dalam rangka mempertimbangkan pemberian kreditnya selain melihat pada prospek usaha yang akan dijalankan (yang seharusnya bisa menunjang pembangunan nasional) juga melihat pada jaminan apa yang akan dijamin oleh pemohon. Padahal jika dilihat pada kenyataannya yang sangat membutuhkan kredit adalah pengusaha-pengusaha kecil

yang justru tidak bisa menyediakan jaminan yang dituntut oleh bank (pasal 24 Undang-undang Perbankan).

Larangan pemberian kredit oleh bank tanpa jaminan sebenarnya bertujuan untuk menjamin supaya kredit dikembalikan oleh debitur sehingga bank tidak rugi tetapi hal ini menghambat usaha-usaha yang dapat menunjang pembangunan nasional yang biasanya diusahakan oleh pengusaha kecil.

Yang dimaksud resiko didalam kredit adalah keadaan tidak membayar kembali atas suatu kredit yang diterima oleh debitur.

Pihak lain yang menerima pengalihan resiko itu disebut sebagai perusahaan yang bergerak dibidang pertanggungan kredit PT Asuransi Kredit Indonesia (untuk kemudian disingkat PT Askrindo). Berdirinya PT Askrindo didirikan oleh peraturan-peraturan pemerintah No 1 / Th.71 dan diundangkan dalam Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1971 No.I.

Pertanggungan oleh pihak asuransi itu ada beberapa macam. Untuk mengetahui dapat kita lihat dalam pasal 247 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (selanjutnya disebut KUHD) yang menyebutkan bahwa asuransi bisa didasarkan pada bahaya kebakaran, bahaya yang mengancam hasil pertanian sawah, jiwa seseorang, bahaya dilautan, bahaya perbudakan, bahaya pengangkutan. Tapi pasal itu bersifat enumeratif perjanjian pertanggungan dengan jenis yang lain.

Pasal 268 KUHD memberi pembatasan pertanggungan terhadap pertanggungan terhadap pertanggungan lain yang tidak dikenal Undang-undang yaitu bahwa pokok pertanggungan adalah kepentingan yang harus dapat dinilai dengan uang dan diancam oleh bahaya dan oleh Undang-undang tidak dikecualikan. Dari ketentuan pasal 268 ini maka asuransi kredit termasuk dalam salah satu asuransi yang tidak dikecualikan oleh Undang-undang. Karena asuransi kredit adalah perjanjian yang sah menurut Undang-undang. (Edy Putra Tjeman, 1989. Hal .49).

Pihak yang ada dalam perjanjian pertanggungan adalah pihak penanggung dan pihak tertanggung. Dalam perjanjian asuransi kredit ini bank adalah sebagai pihak tertanggung sedang PT.Askrindo adalah sebagai pihak penanggung.

PT. Askrindo berhak mendapat premi dari bank, bukan dari nasabah, tapi pada dasarnya bank telah memperhitungkan premi itu dalam memberikan kredit pada masalah yang bersangkutan.

Jumlah pertanggungan pada umumnya berjalan tetap sampai pertanggungan berakhir. Tetapi dalam pertanggungan kredit sejak pertanggungan ditutup hingga berakhir akan berubah menurun. Hal ini terjadi sebab kredit yang diterima oleh debitur harus dikembalikan pada waktu-waktu yang telah ditentukan yaitu dengan cara mengangsur. Jadi pada saat-saat kemudian jumlah kredit yang ditanggung oleh penanggung akan menjadi semakin kecil dan semakin kecil resiko yang ditanggung berarti semakin kecil jumlah penggantian kerugian.

Dalam praktek besarnya kredit yang dipertanggungan bank tidak seluruh kredit tapi hanya sebagian maksimum kreditnya. Berarti pertanggungan kredit yang terjadi dalam praktek perbankan adalah pertanggungan dibawah nilai. Jadi jika terjadi kerugian bank masih menanggung sebagian dari kerugian dari penanggung. Sehingga bank masih punya hak menuntut pemenuhan piutangnya pada nasabah, sebatas kerugian yang tidak ditutup oleh penanggung. Sedang yang tutup oleh penanggung adalah hak penanggung untuk menuntut pemenuhannya.

Hak penanggung menuntut ganti rugi pada debitur adalah berdasarkan subrograsi yang diatur oleh pasal 284 KUHD. Penuntutan hak penanggung kepada debitur dilakukan oleh bank. Setelah debitur memenuhi semua kewajibannya pada bank barulah bank memberikan kepadanya penanggung. Menurut saya hal ini dapat dimengerti karena perjanjian asuransi dilakukan oleh bank dengan penanggung, nasabah tidak mempunyai hubungan apapun

kerugian kepada debitur adalah bank. Baru setelah itu bank memberikan kepada penanggung. Jadi pada dasarnya penanggung menuntut pemenuhan pada bank bukan pada nasabah.

Besarnya premi yang harus dibayar tergantung pada macamnya kredit. Untuk kredit seperti KIK/KMKP preminya 3% dan penarikan premi adalah pada saat realisasi kredit, biaya premi ditanggung oleh bank dan Bank Indonesia masing-masing 50% (jadi setengah dari premi 3%).

Sedangkan untuk kredit eksploitasi biasa dengan maksimum kredit Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) besar preminya. Untuk kredit yang berbentuk rekening Koran seperempat persen dari besarnya kredit per bulannya, dan ditarik selama 4 bulan berturut-turut. Untuk kredit yang bentuknya persekot dikenakan premi satu persen dari besarnya kredit dan dipungut sekaligus pada saat realisasi kredit. Sedang kredit eksploitasi besar diatas dua juta diansuransikan secara kasus per kasus.

Dalam praktek eksekusi yang dilakukan bank ini bertentangan dengan pasal 1266 dan pasal 1267 BW. Dalam pasal 1266 BW dinyatakan bahwa syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan - persetujuan yang bertimbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian perjanjian tidak batal demi hukum tapi pembatalan harus dimintakan pada hakim

Sedang berdasarkan pasal 1267 BW pihak yang dirugikan dapat memilih apabila itu masih dimungkinkan untuk memaksa pihak lain untuk memenuhi perjanjian atau ia menuntut pembatalan perjanjian disertai dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.

Lagi pula biasanya perjanjian kredit bank itu dituangkan dalam suatu akta yang dibuat dihadapan notaris yaitu grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta kuasa memasang hipotek. Semua grosse akta berkepala surat "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", sehingga grosse akta itu mempunyai kekuatan hokum yang sama dengan putusan pengadilan

menurut pasal 224 HIR, grosse akta mempunyai kekuatan hukum untuk melaksanakan eksekusi.

Kelemahan dari penetapan pasal 224 HIR ini adalah ada pula factor kelicikan mengulur waktu dari debitur, ada pula factor kecurangan yang dilakukan debitur dalam rekening pembukaan tetapi yang paling sering adalah adanya kekeliruan pembuatan dokumen yang diperlukan grosse akta yang bersangkutan. Padahal bagi pengadilan dan secara disamakan eksekusinya sebagai putusan yang mempunyai nilai kekuatan eksekusi yang dapat dijalankan eksekusinya.

Dalam praktek sering terjadi pencampuran antara grosse akta hipotek dan gross akta pengakuan hutang. Akibatnya grosse akta yang diajukan ke pengadilan tidak jelas bentuknya, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum.

Seharusnya perjanjian kredit bank dijadikan sebagai perjanjian pokok sedangkan perjanjian hipotek sebagai perjanjian ikutan atau accessoir. Perjanjian hipotek dibuat secara tertulis oleh PPAT tidak dalam bentuk grosse akta.

Biasanya dalam grosse akta perjanjian hipotek disebutkan adanya kuasa memasang hipotek yang nantinya dituangkan dalam suatu grosse akta hipotek. Sering kali pula dalam suatu grosse akta perjanjian hipotek tidak ada sama sekali pernyataan sepihak tentang pengakuan hutangnya. Akibatnya grosse akta ini menjadi tidak mempunyai kekuatan eksekutorial. Dengan adanya grosse akta ini maka bank dapat memperoleh perlunasan kreditnya dengan cepat dan tidak berbelit-belit. Bank tidak rugi waktu dan biaya karena bank dapat mengeksekusi jaminan dan dapat menjual dengan segera. Dari hasil penjualan barang jaminan tersebut bank dapat mengambil pelunasan kreditnya.

5. Penyelesaian Melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

Piutang Negara yang telah macet sama sekali harus segera diserahkan urusan penyelesaiannya kepada PUPN, jika tidak maka PUPN berhak mengambil alih

persoalannya. Landasan pokok keberadaan dan kewenangan PUPN bersumber dari Undang-Undang Nomer 49/Prp/60 diatur dalam pasal 4 dan pasal 5 serta dalam pasal 2 keputusan Presiden Nomer 11, Tahun 1976, diantaranya adalah mengurus piutang Negara yang harus dibayar kepada instansi-instansi pemerintah dan BUMN yang modal atau kekayaannya sebagian atau seluruhnya milik Negara, baik pusat maupun di daerah dan mengawasi piutang-piutang kredit yang telah dikeluarkan oleh instansi-instansi pemerintah dan BUMN baik pusat ataupun daerah.

Sebelum PUPN menyatakan menerima kasus tersebut maka PUPN mengadakan penelitian lebih dahulu tentang duduk perkara kredit macet tersebut, penelitian tersebut kurang lebih selama dua minggu. Penelitian tersebut adalah untuk menetapkan berapa besarnya nilai nominal dan nilai riil hutang tersebut. Nilai nominal menentukan besarnya piutang sesuai dengan perjanjian (hutang pokok ditambah bunga dan biaya-biaya lain). Sedang nilai riil adalah nilai yang diharapkan sebagai hasil maksimum dari realisasi penyelesaian yang akan dilaksanakan.

Setelah PUPN menyatakan menerima kasus tersebut dibuat perjanjian antara bank dengan PUPN dalam bentuk pernyataan serah menerima piutang yang menyatakan bahwa :

- Bank menyerahkan pengurusan piutangnya kepada PUPN
- Bank melepaskan haknya atas debitur
- PUPN akan menyerahkan kepada bank semua hasil tagihan piutang
- Pengurusan penyelesaian hutang tersebut termasuk pelelangan barang-barang yang disita.

Surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh bank dan PUPN, setelah penandatanganan berarti PUPN berhak atas penagihan pada debitur. Sesudah itu PUPN membuat surat teguran kepada debitur untuk membayar hutangnya. Jika debitur tetap tidak membayar maka PUPN akan memanggil debitur tersebut.

Apabila debitur datang menghadap ketua PUPN memenuhi panggilan tersebut maka dibuatlah perjanjian antara debitur dengan PUPN yang dituangkan dalam suatu pernyataan bersama kepala “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa”.

Isi Perjanjiannya : a). Pengakuan debitur tentang besarnya hutang; b). Jumlah kewajiban debitur; c). Hak PUPN untuk melakukan panahan dan sekaligus dengan surat paksa terhadap keseluruhan hutang debitur apabila debitur tidak melakukan kewajibannya untuk memenuhi peringatan yang dikeluarkan PUPN; d). Daftar barang bergerak dan tidak bergerak yang dijadikan jaminan atas hutang dan pemberian kuasa yang tidak dapat dicabut kembali mengenai penguasaan barang-barang tersebut sebelum dipenuhinya isi pernyataan beresama.

Dalam hal surat pernyataan bersama tidak dapat dibuat karena debitur tidak datang setelah dipanggil atau debitur tidak diketahui tempat tinggalnya lagi maka PUPN berhak membuat pengumuman panggilan sebanyak dua kali melalui surat kabar dan selanjutnya dibuat surat paksa. Surat paksa ini mempunyai kekuatan yang sama dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena PUPN dibentuk dengan tujuan untuk menyelesaikan piutang Negara dengan cepat. Dengan ketentuan hukum yang pasti yang sama dengan putusan hakim maka kita akan berbelit-belit lagi.

Penyitaan yang dilakukan oleh PUPN mempunyai dua unsur yaitu : a). Unsur pengamanan yaitu untuk mencegah debitur menggelapkan harta kekayaannya sehingga sumber pelunasan hutang menjadi tidak ada. b). Memberi kesempatan terakhir pada debitur untuk secara suakarela menguangkan barang-barang yang disita atau membayar hutangnya.

Jika debitur ingin melunasi hutangnya dengan menembus barang jaminan maka prosedurnya adalah:

- a. Debitur mengajukan permohonan penembusan kepada PUPN;

- b. PUPN secara tertulis memintakan persetujuan bank mengenai harga penembusan;

- c. Bank atas dasar penilaiannya sendiri memutuskan penembusan itu disetujui atau tidak, jika disetujui maka penembusannya dilakukan di kantor PUPN.

6. Penyelesaian Melalui Pengadilan Negeri.

Penyelesaian kredit melalui Pengadilan Negeri ini dilakukan dalam hal ini tidak dapat dilaksanakan grosse akta. Sebab tidak dapat dilaksanakan oleh bank. Bank tidak dapat melaksanakan kuasa memasang hipotek karena obyek jaminan telah disita terlebih dahulu oleh pihak ketiga. Karena bank hanya mempunyai surat kuasa untuk memasang hipotek saja maka bank dianggap hanya sebagai kreditur konkuren saja. Maka gugatan bank pada pengadilan adalah bank meminta agar pihak debitur dihukum untuk menyerahkan barang jaminannya.

Setelah kasus kredit macet ditangani oleh pengadilan dan seandainya pihak bank yang dimenangkan maka pengadilan akan mengeluarkan suatu putusan yang bersifat kondemnator. Ciri putusan kondemnator adalah dalam amar putusannya terhadap pernyataan “penghukuman” terhadap tergugat untuk melakukan suatu perbuatan. Perbuatan yang diinginkan untuk dilaksanakan bisa bermacam-macam yaitu : a).menyerahkan suatu barang; b).mengosongkan sebidang tanah/rumah; c).Menghentikan suatu perbuatan / keadaan; d).Membayar sejumlah uang

Rincian di ataslah yang menentukan suatu putusan bersifat kondemnator. Putusannya bisa menyangkut salah satu rincian bahkan bisa juga digabungkan antara dua rincian diatas.

Setiap putusan yang bersifat kondemnator dengan sendirinya mempunyai kekuatan hukum eksekutorial (dapat dilaksanakan secara paksa oleh kekuatan umum).

Jika tergugat tidak melaksanakan putusan dengan suka rela maka pengadilan akan mengeluarkan surat peringatan sebelum dilakukan eksekusi. Setelah tenggang waktu dalam surat peringatan sebelum dilakukan eksekusi tetapi dengan lampaunya tenggang waktu tidak berarti tergugat tidak dapat putusan dengan sukarela. Tergugat dapat mengajukan penyelesaian putusan secara sukarela walaupun tenggang waktu peringatan sudah dilampaui.

Setelah menerima surat penetapan maka panitera menjalankan perintah eksekusi dan ia harus memberitahukan dan eksekusi kepada pihak yang kalah.. eksekusi dapat dilakukan dengan bantuan militer. Pada waktu eksekusi dijalankan sebaiknya tereksekusi hadir. Hal ini menyangkut eksekusi mengenai benda yang tidak bergerak (eksekusi riil).

Dalam hal eksekusi pembayaran uang Pengadilan negeri akan melakukan sita eksekusi yaitu melakukan penyitaan terhadap barang-barang tergugat baik bergerak ataupun tidak bergerak. Penyitaan terhadap barang-barang tergugat dilakukan sampai dianggap cukup sebagai pengganti jumlah yang harus dibayar ditambah jumlah biaya menjalankan eksekusi.

7 Penjualan Lelang

Penjualan lelang harus dilakukan dengan perantara Kantor Lelang hal ini sesuai dengan pasal 200 ayat 1 HIR. Dari pasal 200 ayat 1 HIR ini dapat diperinci sebagai berikut :

- Penjualan di muka umum harta kekayaan tergugat yang telah dieksekusi.
- Penjualan di muka umum hanya boleh dilakukan di depan juru lelang.
- Cara penjualannya dengan jalan harga penawaran semakin meningkat menurut melalui penawaran secara tertulis.

Sebelum lelang dilakukan maka lelang tersebut harus diumumkan terlebih dahulu. Pengumuman lelang biasa dimuat dalam surat kabar.

Dari hasil lelang tersebut diambilkan untuk pemenuhan piutang tergugat . piutangnya meliputi tagihan pokok tergugat ditambah biaya eksekusi. Jika dari hasil lelang ini masih kurang maka ketua Pengadilan Negeri berhak memerintahkan eksekusi lanjutan terhadap harta kekayaan tereksekusi.

Tetapi jika hasil lelang telah cukup dan bahkan lebih untuk membayar tagihan pokok biaya eksekusi maka kelabihannya dikembalikan kepada tereksekusi.

Sedangkan lelang menurut PUPN lain lagi. PUPN juga berhak melakukan persitaan terhadap barang debitur dan melakukan lelang. Setelah PUPN menyita barang-barang debitur, PUPN akan mengumumkan lelang tersebut dalam surat kabar, baru lelang dilakukan. Pada waktu lelang dilakukan pihak bank dapat diundang untuk menghadiri lelang tersebut. Hasil lelang itu harus memenuhi jumlah piutang debitur yaitu : $100\% + 10\% = 110\%$.

- $10/100 \times \text{Besarnya setoran debitur} = \text{Biaya administrasi PUPN}$
- $10/100 \times \text{Besarnya setoran debitur} = \text{Hasil bersih yang diterima oleh bank}$

Dalam praktek perbaikan dari hasil ulang seandainya kurang 10% dari keseluruhan jumlah hutang pokok ditambah biaya eksekusi maka dapat dilakukan penghapusan atau dengan penghapusan bunga kredit tetapi kalau lebih dari 10% maka kekurangan itu dapat dituntut dari debitur.

Penyelesaian menurut hukum ini menurut saya adalah untuk melindungi bank dari kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi yang dilakukan oleh debitur.

Sedang bagi debitur juga ada manfaatnya yaitu supaya debitur tidak mendapat perbuatan sewenang-wenang dari bank. Dengan jalur hukum ini debitur akan mendapat perlindungan hukum karena kreditur tidak dapat bertindak diluar aturan hukum yang ada.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Penyelesaian melalui jalur hukum yang ada merupakan langkah pengamanan baik untuk debitur dan pihak bank. Bagi debitur keuntungannya adalah tidak akan terkena perbuatan semena-mena dari kreditur. Sedang bagi bank/kreditur, dapat menagih hutangnya dan seandainya debitur tidak mau membayar hutangnya maka bank dapat melakukan penyitaan barang jaminan. Sehingga bank tidak dirugikan karena perbuatan debitur yang tidak melakukan kewajibannya.

Saran.

Perjanjian kredit sebaiknya diseragamkan dalam suatu bentuk perjanjian kredit yang telah disahkan oleh pemerintah. Perjanjian kredit tersebut sebaiknya langsung mempunyai kekuatan hukum yang tetap, yang sama dengan putusan pengadilan yang dapat langsung dilaksanakan eksekusinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Edy Putra Tjeman, 1989. **Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis**. Liberty, Yogyakarta.
- Harahap, Yahya, 1989. **Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata**, Gramedia, Jakarta.

- Sinungan, Mucdarsyah, 1987. **Kredit Seluk Beluk Dan Teknik Pengadaan**, Yagrat, Jakarta
- Subekti, 1987. **Hukum Perjanjian**, Intermasa, Jakarta
- _____, 1985 **Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum**_____, Pradnya Paramita Jakarta Pusat .
- Teguh Pudjo Muljono, 1987. **Management Perkreditan Bagi Bank Komersil**, BPFE, Yogyakarta
- Subekti, 1985. **Kitab Undang-undang Hukum Perdata**, Cet. XIX, Pradnya paramita, Jakarta Pusat.
- Subekti, 1987. **Hukum Perjanjian**, Cet.XI, Intermasa, Jakarta.
- Pedoman Umum Operasi Perkreditan BRI, Jakarta ,1981
- Undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan